



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Jend. Sudirman No. 6
KOTA GORONTALO - 96128**

Telp (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690 Email : PPs.ung@ac.id.

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 91/UN47.C/KP/2015**

tentang

**PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM ANGKATAN 2014-2015
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang : a. Bahwa dalam kegiatan akademik Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan disusunnya tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
- b. Bahwa untuk membimbing penulisan tesis tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan akademik;
- c. Berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004 tentang Pengalihan Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo.
- e. Keputusan Presiden RI Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 10 September 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
- f. Peraturan Mendiknas Nomor 10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo.
- g. Peraturan Mendiknas Nomor 18 tahun 2006 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo.
- h. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 106/E/O/2014 Tanggal 19 Mei 2014 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi S2 Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo
- i. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 1775/UN47/KP/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 042.01:400961/2016 tanggal 05 Desember 2015

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan sebagai Komisi Pembimbing Tesis Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2014-2015 Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Kedua : Tugas pembimbing, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusi-kannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi tesis.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.

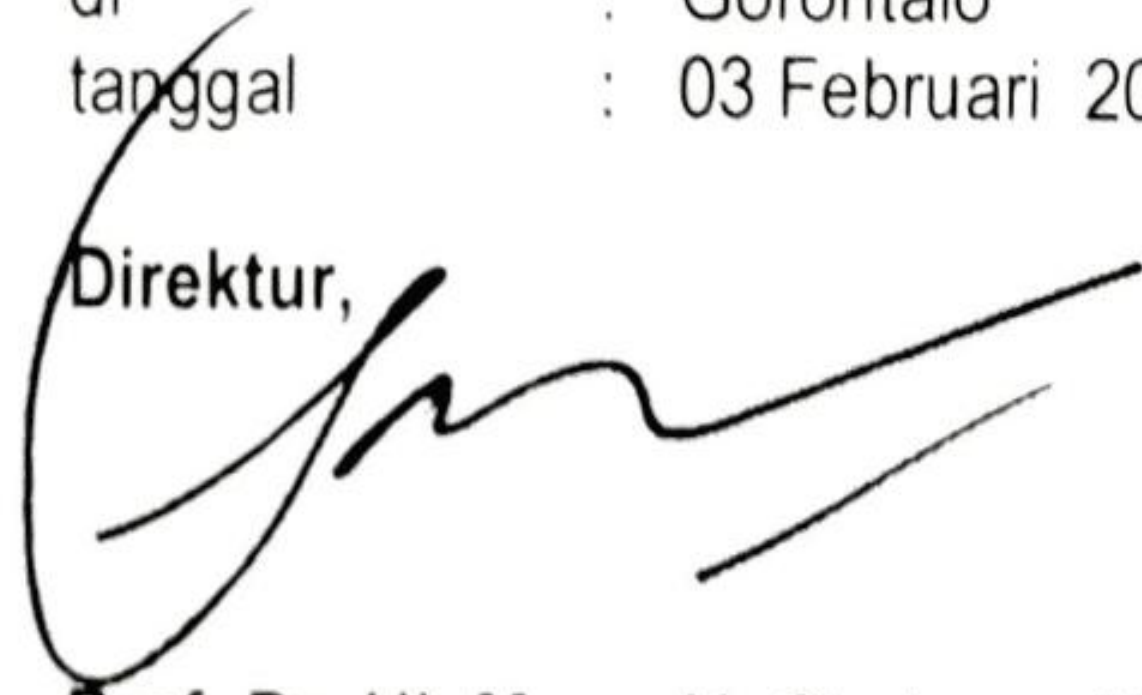
Demikianlah keputusan ini diterbitkan, disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

di : Gorontalo

tanggal : 03 Februari 2015

Direktur,



Prof. Dr. Hj. Moon H. Otoluwa, M.Hum
NIP. 19590902 198503 2 001

Tembusan yang terhormat,

1. Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Wakil Direktur I dan II PPs Universitas Negeri Gorontalo.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Bendahara PPs UNG

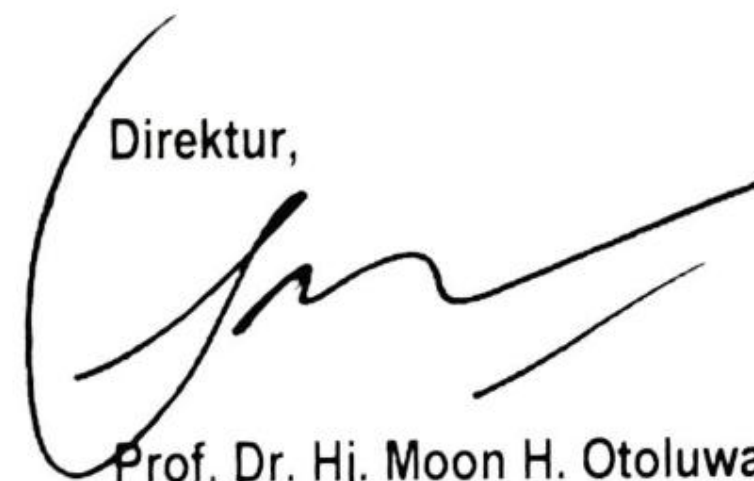
Lampiran : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
 Nomor : 91 /UN47.C/ KP/ 2015
 Tanggal : 03 Februari 2015
 Tentang : **Penetapan Komisi Pembimbing Tesis Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2014-2015 Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.**

NO.	NAMA MAHASISWA	JUDUL TESIS	PEMBIMBING
1	Arafat Romer	Tinjauan Yuridis Terhadap PenuntutanTindak Pidana Pemilu Yang telah Daluarsa.	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum (Pembimbing I) 2. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. (Pembimbing II)
2	Arifin Ibrahim	Analisis Yuridis Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Gorontalo.	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum (Pembimbing I) 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H (Pembimbing II)
3	Ariyanto Banteng	Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Gorontalo Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum (Pembimbing I) 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H. (Pembimbing II)
4	I.Made Sudiarta	Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menerbitkan Peraturan MA No.1 Tahun 2008 Dalam Rangka Memperbaharui Hukum Acara	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum. (Pembimbing I) 2. Prof. Dr. Fenty U. Puluwulawa, SH, M.Hum (Pembimbing II)
5	Jaharudin Umar	Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Guru Di Gorontalo	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum (Pembimbing I) 2. Dr. Rauf A. Hatu, M.Si (Pembimbing II)
6	Mohamad Ikbal Kadir	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa di Kabupaten Gorontalo	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum (Pembimbing I) 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H (Pembimbing II)
7	Pattanuddin	Analisis Yuridis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Di Kabupaten Gorontalo	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum. (Pembimbing I) 2. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH (Pembimbing II)
8	Yeti Yunus Ibrahim	Kedudukan Benda Jaminan Atas Tanah Sebagai Hak Tanggungan Ditinjau Dari Hukum Kepailitan	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. (Pembimbing I) 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H. (Pembimbing II)

NO.	NAMA MAHASISWA	JUDUL TESIS	PEMBIMBING
9	Sri Mila Ulitoto	Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Kab. Gorontalo	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum (Pembimbing I) 2. Dr. Muh. Yani Firdaus SH., MH. (Pembimbing II)
10	Ali Rajab	Proses Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Sebagai Upaya Pembinaan Anak.	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum (Pembimbing I) 2. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. (Pembimbing II)
11	Arlan Helingo	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum (Pembimbing I) 2. Dr. Muh. Yani Firdaus SH., MH. (Pembimbing II)
12	Banelaus Naipospos	Analisis Yuridis Penerapan Pidana Tambahan Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum (Pembimbing I) 2. Dr. Muh. Yani Firdaus SH., MH (Pembimbing II)
13	Encang Hermawan	Gorontalo Tentang Pengadaan Bahan Pustaka pada Kantor Perpustakaan Daerah Kab. Bone Bolango	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum.(Pembimbing I) 2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum.(Pembimbing II)
14	Katrinawati Lasena	Pernyataan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum (Pembimbing I) 2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum (Pembimbing II)
15	Mashuri	Pro-Kontra Penetapan Hukuman Mati di Indonesia (Upaya Mencari Nilai Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum)	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum. (Pembimbing I) 2. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. (Pembimbing II)
16	Meyke M. Camaru	Pelaksanaan Pembuktian Terbalik dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus).	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum. (Pembimbing I) 2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum (Pembimbing II)
17	Yulyan Rahim	Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 56 Ayat 1 KUHP Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Analisis Perlindungan Hukum Bagi hak-hak Tersangka).	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum (Pembimbing I) 2. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. (Pembimbing II)

NO.	NAMA MAHASISWA	JUDUL TESIS	PEMBIMBING
18	Suwarti Suna	Pembinaan Hukum Bagi Narapidana Orang Tua Kandung Terhadap Pemerksaan Anak Kandung.	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum (Pembimbing I) 2. Dr. Muh. Yani Firdaus SH., MH. (Pembimbing II)
19	Cristian Armstrong Thijme	Status Dan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan .	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. (Pembimbing I) 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H (Pembimbing II)
20	Risnawaty Husain	Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Itikad Baik Dalam Suatu Hukum Perjanjian.	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH.(Pembimbing I) 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H. (Pembimbing II)
21	Sitriya Daud	Analisis Sosio-Yuridis Putusan MK No.46/PPU-VIII/2010 Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Nikah.	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. (Pembimbing I) 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H. (Pembimbing II)
22	Padmilah	Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Persfektif Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum. (Pembimbing I) 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H. (Pembimbing II)
23	Yeti Yunus Ibrahim	Kedudukan Benda Jaminan Atas Tanah Sebagai Hak Tanggungan Ditinjau Dari Hukum Kepailitan.	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. (Pembimbing I) 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H. (Pembimbing II)

Direktur,



Prof. Dr. Hj. Moon H. Otoluwa, M.Hum
NIP. 19590902 198503 2 001



SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Nomor : 1049/UN47.C/KM/2016

TENTANG

**PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM ANGKATAN 2015-2016
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan disusunnya tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
- b. bahwa untuk membimbing penulisan tesis tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan akademik;
- c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor: 106/E/O/2014 Tanggal 19 Mei 2014 tentang izin Penyelenggaraan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/H47.A2/DT/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana Untuk Atas Nama Rektor Menandatangani Surat Keputusan yang Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;

15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 59/UN47/KP/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Memperhatikan : 1. Daftar Usulan Nama Dosen Pembimbing Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum yang dilengkapi dengan Judul Tesis.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 042.01:400961/2016 tanggal 05 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan sebagai Komisi Pembimbing Tesis Program Magister Ilmu Hukum Angkatan 2015-2016 Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
Kedua : Tugas pembimbing, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusikannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi tesis.
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : GORONTALO
PADA TANGGAL : 29 NOVEMBER 2016

Direktur,



Prof. Dr. H. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd
NIP 196006031986031003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
2. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
3. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
4. Arsip

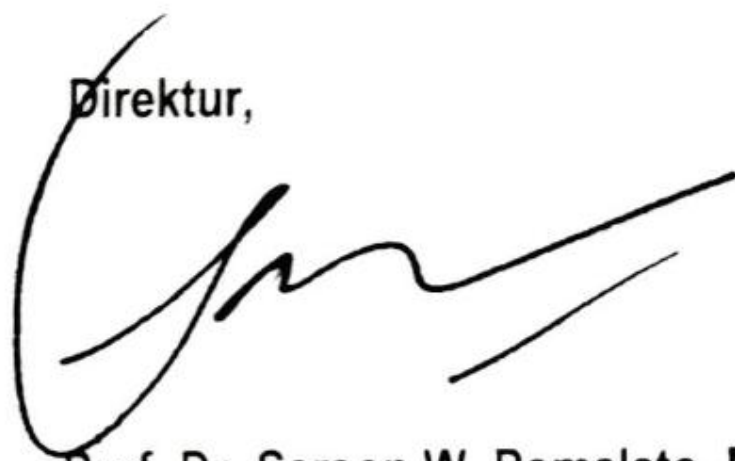
Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
 Nomor : 1049/UN47.C/ KM/ 2016
 Tanggal : 29 November 2016
 Tentang : Penetapan Komisi Pembimbing Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Angkatan 2015-2016

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL TESIS	PEMBIMBING
1	Ichsan Adrias Male	751415013	Peran Sekretaris DPRD (SEKWAN) Bonebolango Dalam Menunjang Kinerja Anggota DPRD Bone Bolango	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Duke Arie Widagdo., SH., M.H
2	Ifriyanto Rahman	751415014	Efektivitas Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Gorontalo Utara	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Udin Hamim, S.Pd, M.Si
3	Moh. Fajri Arsyad	751415020	Kedudukan Hukum DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
4	Murtiyanun A. Abdullah	751415021	Efektivitas Pengawasan Inspektorat Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
5	Gusniarjo Mokodompit	751415010	Totalitas Serambi Madinah Dengan Falsafah Adat Bersendikan Syara', Syara' bersendi Kitabullah Dalam Pandangan Hukum Tata Negara	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
6	Karim R. Toiti	751415017	Sinergitas Antara Kepala Daerah Kabupaten Kota Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Gorontalo Tentang Penetapan Desa Wisata	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Udin Hamim, S.Pd, M.Si
7	Husin Mahmud	751415012	Implikasi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum
8	Rustam Anwar	751415023	Peran Lembaga Adat Dalam Sistem Pemerintah Daerah (Studi Kasus Lembaga Adat Kabupaten Gorontalo)	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
9	Julianti Katili	751415016	Konsep Pidana Anak (Anak Sebagai Korban) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum 2. Dr. Zainuddin., MH
10	Avelia Rahma Y. Mantali	751415004	Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Di Polda Gorontalo)	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL TESIS	PEMBIMBING
11	Karmila D. Radjak	751415018	Efektivitas Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Gorontalo	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum 2. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
12	Nurdiana Sultan	751415022	Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum 2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum
13	Wulandari Cicilia Kusumawardani	751415028	Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Laundering Dengan Sistem Pembuktian Terbalik	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum 2. Dr. H. Zainuddin Mappong, SH., M.Hum
14	Endro Heryanto	751415008	Analisis Yuridis Terhadap Bukti Elektronik (Dokumen Elektronik) : Kedudukan, Nilai, Derajat dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Hukum Acara Ditingkat Peradilan (Studi Kasus Di PN Gorontalo/PN Limboto)	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum 2. Dr. Duke Arie Widagdo, SH., M.H
15	Andi Munarty	751415002	Tinjauan Tentang Sanksi Verbalisan Terhadap Tindak Pidana Narkotika	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
16	Sudaryono Kai	751415027	Pembahasan Hak Atas Tanah Guna Perluasan Bandara Djalaludin Gorontalo	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
17	Mansyur	751415019	Eksekusi Putusan Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dengan Objek Sengketa Tanah dan Bangunan Oleh Pengadilan Negeri Gorontalo	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
18	Dhevie Julianti Siden	751415006	Peran Badan Pertahanan Nasional (BPN) Dalam menanggulangi Penertbitan Sertifikat Hak Milik Ynag Masih Berstatus Tanah Adat	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
19	Iwan Idrus Adam	751415015	Analisis Yuridis Pengalihan Lahan Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH 2. Dr. Andi Mulyani Hasyim, SH., MH
20	Dewi Andani Arsyad	751415005	Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Membantu Penanggulan Kemiskinan	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
21	Sofyan Tou	751415026	Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Dibawah Umur Dan Pengaruhnya Bagi kehidupan Berumah Tangga	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
22	Salahuddin Little	751415024	Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran auandang-Undang Hak Cipta Tentang Keaslian Gema Takbiran Di Provinsi Gorontalo	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum 2. Dr. Andi Mulyani Hasyim, SH., MH

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL TESIS	PEMBIMBING
23	Fricilia Jelita Wartabone	751415009	Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Mati Kasus Narkotika Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika Di Gorontalo	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum 2. Dr. Zainuddin., MH
24	Gustin Lihawa	751415011	Pertanggung Jawaban Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Pembunuh Ayah kandungnya	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum 2. Dr. Duke Arie Widagdo, SH., M.H

Direktur,



Prof. Dr. Sarson W. Pomalato, M.Pd
NIP:196006031986031003



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 1023/UN47.C/KM/2017

tentang

PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
TAHUN AKADEMIK 2016/2017
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan disusunnya tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
b. bahwa untuk membimbing penulisan tesis tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan akademik;
c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
3. Undang – undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004 tentang Pengalihan Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo.
8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 193/MPK/A4/2014 tanggal 10 September 2014 Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo masa jabatan 2014 – 2018;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 59/UN47/KP/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 106/E/O/2014 Tanggal 19 Mei 2014 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi S2 Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo;

13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/H47.A2/DT/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Untuk Atas Nama Rektor Menandatangani Surat Keputusan yang Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
14. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 59/UN47/KP/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Memperhatikan : 1. Daftar usulan nama Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister Ilmu hukum yang dilengkapi dengan Judul Tesis.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo Nomor: SP.DIPA-042.01.2.400961/2017 tanggal 7 Desember 2016.

Memutuskan

- Menetapkan :**
Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Komisi Pembimbing Tesis Program Magister Ilmu Hukum Tahun Akademik 2016/2017 Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
Kedua : Tugas pembimbing, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusikannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi tesis..
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Tanggal : 06 Oktober 2017

Direktur,



Prof. Dr. H. Sarson W.DJ. Pomalato, M.Pd
NIP. 196008081986021003

Tembusan Yth :

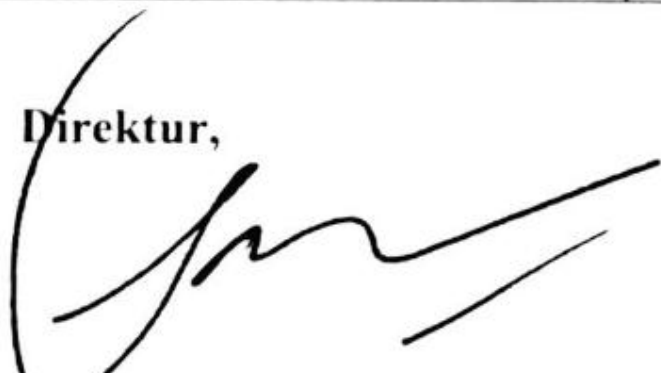
1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
5. Arsip:-

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
 Nomor : 1023/UN47.C/KM/2017
 Tanggal : 06 Oktober 2017
 Tentang : Penetapan Komisi Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo T.A 2016/2017.

NO	NAMA	JUDUL TESIS	PEMBIMBING
1	Haddra G. Dotulong	Konsep Pidana Overmacht dalam Pembaharuan Hukum Pidana	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa. SH., M.Hum 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow. S.H., M.H.
2	Tri Desmanto Neno	Konsep Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Radikalisme Agama di Gorontalo	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa. SH., M.Hum 2. Dr. Nur Mohamad Kasim. S.Ag, M.H
3	Nur Abidin Rahman	Tinjauan Kriminologi Prostitusi Terselubung di Kota Gorontalo	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa. SH., M.Hum 2. Dr. Fence M. Wantu. SH., MH
4	I Gede Purnadita	Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa. SH., M.Hum 2. Dr. Duke Arie Widagdo. SH.,M.H
5	Iriyanto Tiranda	Analisis Yuridis Penerapan Diversi pada Peradilan Pidana Anak	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa. SH., M.Hum 2. Prof. Dr. Johan Jasin. SH., M.Hum
6	Rongki Ali Gobel	Urgensi Kedudukan Advokad Sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa. SH., M.Hum 2. Dr. Duke Arie Widagdo. SH.,M.H
7	Nolvionita Sofyan	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) di Kota Gorontalo	1. Dr. Fence M. Wantu. SH., MH 2. Dr. Udin Hamim. S.Pd, M.Si
8	Ngguli Liwar P Awang	Penerapan Gugatan Sederhana (Small Calim Court) dalam Hukum Perdata Indonesia Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Sesuai dengan Azas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan	1. Dr. Fence M. Wantu. SH., MH 2. Dr. Andi Muliani. SH., M.H
9	Narumalina Lumalaga	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diatas Hak Ulayat	1. Dr. Nur Mohamad Kasim. S.Ag, M.H 2. Dr. Andi Muliani. SH., M.H
10	Rian Adi Putra Nurdin	Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga tanpa Persetujuan Kreditur	1. Dr. Fence M. Wantu. SH., MH 2. Dr. Nur Mohamad Kasim. S.Ag, M.H
11	Rahmat Adam	Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya	1. Dr. Fence M. Wantu. SH., MH 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow. S.H., M.H.
12	Dian Novita Baruadi	Peran Apraisal Terhadap Pembebasan Lahan Pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara	1. Dr. Nur Mohamad Kasim. S.Ag, M.H 2. Prof. Dr. Johan Jasin. SH., M.Hum
13	Andy Y. Supriadi	Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Perubahan Keempat UUD 1945	1. Prof. Dr. Johan Jasin. SH., M.Hum 2. Dr. Udin Hamim. S.Pd, M.Si
14	Ismail M. Djafar	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja <i>Outsourcing</i> di Kota Gorontalo	1. Prof. Dr. Johan Jasin. SH., M.Hum 2. Dr. Nur Mohamad Kasim. S.Ag, M.H

15	Firra Kristaung	Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Anak di Tinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Kota Gorontalo	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.
16	Tri Oktavia Hilala	Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan (Kajian Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011)	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Duke Arie Widagdo, SH.,M.H
17	Ria Rizki Ibrahim	Peran Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Gorontalo	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
18	Kamarudin Dunggio	Analisis Terhadap Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 6 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Baca Tulis Al-Qur'an bagi Masyarakat yang Beragama Islam Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Duke Arie Widagdo, SH.,M.H
19	Ronal Hasiru	Penerapan Jabatan PPK Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Bagi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Gorontalo	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Zainuddin Mappong, SH., M.H
20	Kadek Wijayanto	Kedudukan Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
21	Halim Monoarfa	Evektifitas Pelaksanaan Rehabilitas Korban Penyalagunaan Narkotika di Kota Gorontalo	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.

Direktur,


Prof. Dr. H. Sarson W.DJ. Pomalato, M.Pd
NIP. 196008081986021003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 741/UN47.C/KM/2019

TENTANG

PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER HUKUM
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan disusunnya tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
b. bahwa untuk membimbing penulisan tesis tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan akademik;
c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
3. Undang – undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004 tentang Pengalihan Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo.
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 193/MPK/A4/2014 tanggal 10 September 2014 Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo masa jabatan 2014 – 2018;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 59/UN47/KP/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018
12. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 106/E/O/2014 Tanggal 19 Mei 2014 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi S2 Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/1/2018 Tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo;
15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/H47.A2/DT/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Untuk Atas Nama Rektor Menandatangani Surat Keputusan yang Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
16. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 59/UN47/KP/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Memperhatikan : 1. Daftar usulan nama Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister hukum yang dilengkapi dengan Judul Tesis.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo Nomor: SP.DIPA-042.01.2.400961/2019 tanggal 7 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG

- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Komisi Pembimbing Tesis Program Magister Hukum Tahun Akademik 2018/2019 Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- KEDUA : Tugas pembimbing, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusi-kannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi tesis..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo

Tanggal 17 Juni 2019

~ DIREKTUR,

SARSON W.DJ. POMALATO

NIP. 196008081986021003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 NOMOR 741/UN47.C/KM/2019
 TANGGAL 17 JUNI 2019
 TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN
 AKADEMIK 2018/2019

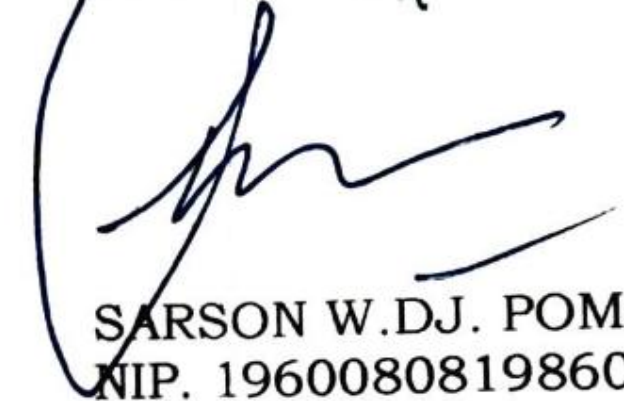
NO	NAMA/NIM	JUDUL TESIS	PEMBIMBING
1	Marleni Makuta 710 518 001	Model Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum 2. Dr. Duke Arie Widagdo, SH.,MH,C.L.A
2	La Aba 710 518 004	Mekanisme Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum 2. Dr. Duke Arie Widagdo, SH.,MH,C.L.A
3	Sutrisno 710 518 045	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Di Lakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor : 19/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Gtlo)	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa,SH.,M.Hum 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH
4	Nustiludin 710 518 036	Analisis Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa,SH.,M.Hum 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH
5	Fadila Suronoto 710 518 002	Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintahan (Studi Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Gorontalo)	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum 2. Dr. Nina Mirantie Wirasaputri, SH.,MH
6	Evi Hastuti 710 518 026	Analisis Kebijakan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mantan Narapidana	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH
7	Fatmawaty S. Khali 710 518 048	Efektifitas Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa,SH.,M.Hum 2. Dr. Duke Arie Widagdo, SH.,MH,C.L.A
8	Wahana Sazpah 710 518 034	Pertanggungjawaban Korporasi Maskapai Penerbangan Indonesia Atas Kecelakaan Pesawat Udara	1. Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH 2. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH
9	Heny Mudji Rahaju 710 518 046	Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa,SH.,M.Hum 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH
10	Raqhda Nazwillah W. Hulukati 710 518 010	Efektifitas Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Hak Cipta (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa,SH.,M.Hum 2. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH
11	Awal Ratna Margasari 710 518 044	Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Terhadap Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan	1. Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH
12	Adam Hutamansyah 710 518 028	Tipologi Kejahatan Korupsi Versus Kejahatan Perbankan (Studi Kasus Perkara Bank Sulutgo Cabang Limboto)	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa,SH.,M.Hum 2. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH

13	Ronal Ngadi 710 518 013	Problematika Hukum Kompetensi Absolut Pengadilan Terhadap Hak Eksekusi Atas Objek Tanggungan Ekonomi Syariah	1. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH 2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum
14	Victor Raymond Yusuf 710 518 032	Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Pasal 127 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa,SH.,M.Hum 2. Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH
15	Sofyan Piyo 710 518 017	Model Akuntabilitas Partai Politik Terhadap Penggunaan Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum 2. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH
16	Mohamad Batu 710 518 016	Kriminalisasi Penyidik Kepada Tersangka Dalam Proses Penyelidikan (Studi Kasus Putusan Nomor : 03/PRAPER/2008/PN.Mdo)	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa,SH.,M.Hum 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH
17	Meylinda Miolo 710 518 041	Efektivitas Pengawasan Bumdes Di Kabupaten Bone Bolango	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum 2. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH
18	Nabih Amer 710 518 023	Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum 2. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH
19	Hendra Dude 710 518 030	Model Koordinasi Penanganan Perkara Korupsi Antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa,SH.,M.Hum 2. Dr. Nina Mirantie Wirasaputri, SH.,MH
20	Tegar Mawang Dhita 710 518 027	Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)	1. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH
21	Ahmad Khairuddin 710 518 019	Lembaga Prapradilan Sebagai Alat Kontrol Bagi Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa,SH.,M.Hum 2. Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH
22	Adhan 710 518 042	Perlindungan Hukum Lembaga Keuangan Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum 2. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH
23	Rismanto Kaku 710 518 012	Urgensi Pengaturan Trading In Influence Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap KPK	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa,SH.,M.Hum 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH
24	Susanti Hasan 710 518 022	Aset Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Hukum dan Keuangan Negara	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum 2. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH
25	Sitti Saadiyah Aid 710 518 025	Perlindungan Hukum Dalam Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Keturunan Arab Di Kota Gorontalo	1. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH 2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum
26	Arki Pselon 710 518 018	Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak	1. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH
27	Gledis Yassin 710 518 024	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	1. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH
28	Rusmansyah Daipaha 710 518 006	Penegakan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	1. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH 2. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH

29	Andrianus Suleman 710 518 011	Penerapan Sistem Presidensial Pasca Amandemen UUD NRI 1945	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum 2. Dr. Duke Arie Widagdo, SH.,MH,C.L.A
30	Ramli K. Baderan 710 518 015	Kontadiksi Putusan Mahkamah Agung Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat Calon Anggota DPD RI Pada Pemilu Tahun 2019	1. Dr. Fence M. Wantu,SH.,MH 2. Dr. Duke Arie Widagdo,SH.,MH.,C.L.A
31	Daniel Ta'dung 710 518 035	Implementasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dalam Tindak Pidana Korupsi Aparatur Sipil Negara	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluwulawa, SH.,M.Hum 2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum
32	Siti Fatimah Julia 710 518 037	Tinjauan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Waris	1. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH 2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum
33	Fibriyanti Karim 710 518 021	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-VIII/2017 Tentang Batas Usia Kawin	1. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH 2. Dr. Duke Arie Widagdo,SH.,MH.,C.L.A
34	Melki T. Tunggati 710 518 014	Legalitas Nikah Beda Agama dan Implikasi Hukumnya Terhadap Anak Yang Di Lahirkan	1. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH 2. Dr. Fence M. Wantu,SH.,MH
35	Makrun 710 518 033	Efektifitas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluwulawa, SH.,M.Hum 2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum
36	Dian Amelia Sahami 710 518 008	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin	1. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.
37	Yusuf Husen 710 518 047	Kajian Hukum Atas Perubahan Tarif Pajak PPH Pasal 23 Dalam Perspektif Hukum Pajak Indonesia	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum 2. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH
38	Fatimah Fitra Djafar 710 518 020	Status Tanah Wakaf Di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo (Studi Kasus Masjid Al-Qamar Jl. Rambutan)	1. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH 2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum
39	Uyan Kelfiyanto Husain 710 518 039	Implementasi Tugas dan Fungsi Legislasi Desa (Studi Kasus Desa Se- Kecamatan Anggrek)	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum 2. Dr. Duke Arie Widagdo,SH.,MH.,C.L.A
40	Wawan Andi Susanto 710 518 038	Fungsi Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Sebagai Wujud Penegakan Hukum Di Wilayah Kota Gorontalo	1. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH
41	Nasrudin 710 517 018	Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Indonesia (Studi Terhadap Pencatatan dan Usia Perkawinan Di Indonesia)	1. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH 2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum
42	Mansur K. Rahim 710 518 051	Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Di Dinas Nakertrans Provinsi Gorontalo	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH
43	Sarlin R. Ali 710 518 005	Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Polres Boalemo)	1. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH 2. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH

44	Saprudin D. A. Maksum 710 518 029	Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo)	1. Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH
45	Rahmat R. Huwoyon 710 518 050	Disparitas Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak	1. Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH
46	Hirsam Gustiawan 710 518 049	Konsep Pidana Overmacht Dalam Perspektif Hukum Pidana	1. Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH

Ditetapkan Di Gorontalo
DIREKTUR



SARSON W.DJ. POMALATO
NIP. 196008081986021003



KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 1300/UN47.C/KM/2018

tentang

**PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER HUKUM
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

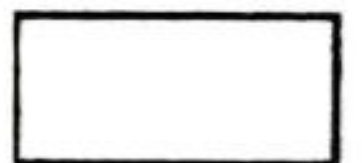
Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan disusunnya tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
b. bahwa untuk membimbing penulisan tesis tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan akademik;
c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
3. Undang – undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004 tentang Pengalihan Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo.
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 193/MPK/A4/2014 tanggal 10 September 2014 Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo masa jabatan 2014 – 2018;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 59/UN47/KP/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018
12. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 106/E/O/2014 Tanggal 19 Mei 2014 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi S2 Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/1/2018 Tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo;
15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/H47.A2/DT/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Untuk Atas Nama Rektor Menandatangani Surat Keputusan yang Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
16. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 59/UN47/KP/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Memperhatikan : 1. Daftar usulan nama Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister hukum yang dilengkapi dengan Judul Tesis.

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo Nomor: SP.DIPA-042.01.2.400961/2017 tanggal 7 Desember 2016.



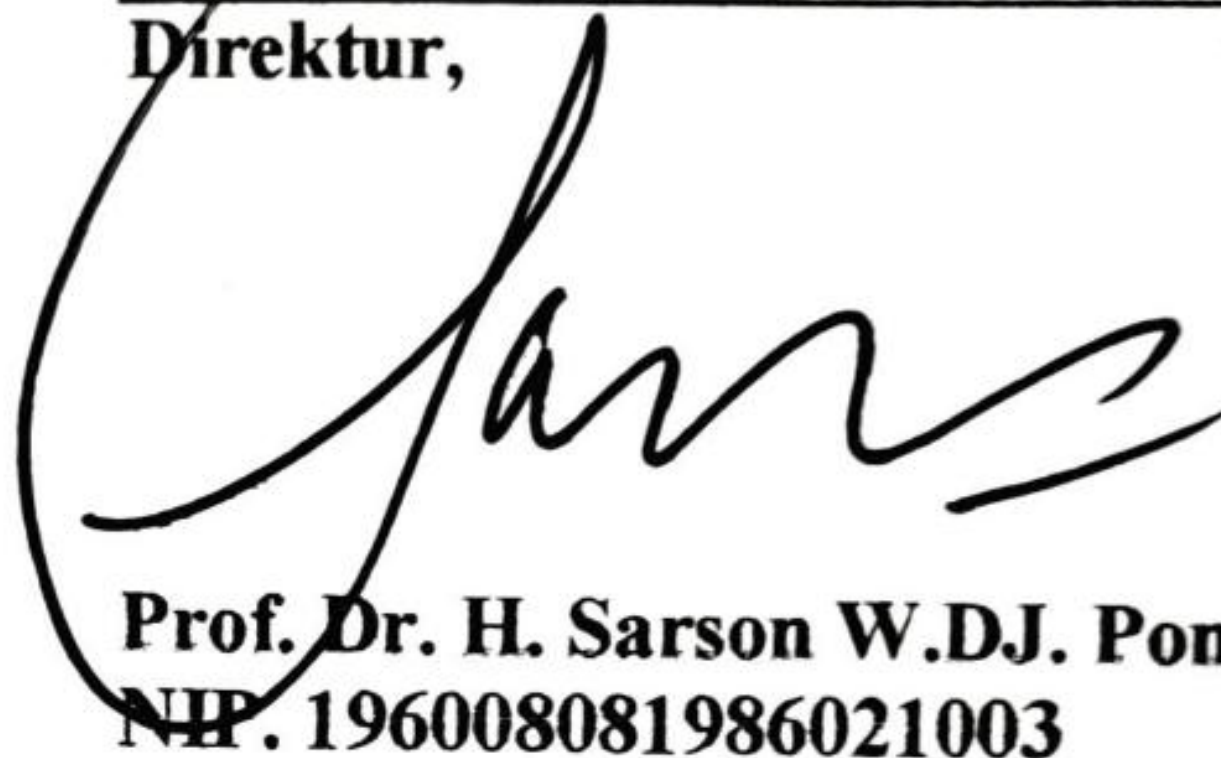
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Komisi Pembimbing Tesis Program Magister Hukum Tahun Akademik 2018/2019 Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Kedua** : Tugas pembimbing, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusikannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi tesis..
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : GORONTALO

TANGGAL : 30 OKTOBER 2018

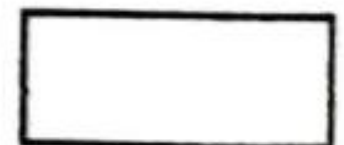
Direktur,



Prof. Dr. H. Sarson W.DJ. Pomalato, M.Pd
NIP. 196008081986021003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
5. Arsip;-



Lampiran : Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
 Nomor : 1300/UN47.C/KM/2018
 Tanggal : 30 Oktober 2018
 Tentang : Penetapan Komisi Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Tahun Akademik 2018/2019.

NO	NAMA/NIM	JUDUL TESIS	PEMBIMBING
1	Andi Muhammad Yusuf Ariffuddin NIM : 710517002	Perlindungan Hukum Terhadap Pers dalam Mencantumkan Identitas Publik Figur Sebagai Pelaku Kejahatan di Media Massa	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH, MH
2	Nunung I. Paudi NIM : 710517019	Efektifitas Penanganan Kasus-Kasus dalam Rangka Peningkatan Kinerja (Studi Kajian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Puhuwato).	1. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH, MH 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.
3	Ririn Wulandari NIM : 710517021	Penerapam Prinsip <i>Judicial Restraint</i> Oleh Mahkamah Konstitusi dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Duke Arie Widagdo, SH, MH
4	Danial Puluhulawa NIM : 710517017	Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH, MH
5	Wahyuni Pakaya NIM : 710517025	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mencabut Ketentuan Pasal (268 Ayat 3 Kuhap) Tentang Upaya Hukum Luar Biasa Penijauan Kembali dan Penerapannya di Indonesia	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH 2. Dr. Duke Arie Widagdo, SH, MH
6	Dirar Sahami NIM : 710517004	Konsep Ideal Pengaturan Pra Peradilan dalam Praktek Sistem Peradilan di Indonesia	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH 2. Dr. Andi Mulyani, SH, MH
7	Indra Dalimunthe NIM : 710517011	Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum 2. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
8	Fadli Bukoting NIM : 710517005	Penerapan Azas ' In Absentia ' Pada Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Tinjau dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.
9	Hamdan Tuna NIM : 710517009	Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Dilindungi di Indonesia	1. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H 2. Dr. Duke Arie Widagdo, SH, MH
10	Linda Tinengke NIM : 710517014	Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pertambangan Rakyat di Desa Tulabolo Timur Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum

11	Siti Alfisyahrin Lasori NIM : 710517024	Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Sengketa Waris Orang Islam	1. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H 2. Dr. Andi Mulyani, SH, MH
12	Gadis Aroyan NIM : 710517008	Implementasi UU 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Gorontalo Utara	1. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H
13	Irlan Puluhulawa NIM : 710517012	Pemberian Grasi oleh Presiden Kepada Terpidana Kasus Narkotika dalam Perspektif Politik Hukum	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH, MH
14	Maryani Podungge NIM : 710517015	Tinjauan Yuridis Penetapan Setya Novanto oleh KPK di Hubungkan Dengan KUHAP	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Duke Arie Widagdo, SH, MH
15	Yakop Lahati NIM : 710517026	Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Kasus Penganiayaan Yang Berakhir Damai	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.
16	Rusly NIM : 710517023	Permasalahan Eksekusi di Pengadilan Agama	1. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H 2. Dr. Andi Mulyani, SH, MH
17	Megawati S. Moha NIM : 710517016	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik ASN Calon Independen Peserta Pemilu	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Udin Hamim, S.Pd, M.Si
18	Fardiansyah Tamala NIM : 710517006	Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
19	Ishak Suko NIM : 710517013	Kekuatan Sertifikat Fidusia Berdasarkan Akta Perjanjian Fidusia yang Memuat Klausula Baku	1. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H 2. Dr. Andi Mulyani, SH, MH
20	Firman Samad NIM : 710517007	Kewenangan Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili Antara Pengadilan (Studi Atas Putusan Nomor 001-SKM/KM4/2015)	1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
21	Herdianto H.R. Balo NIM : 710517010	Analisis Yuridis Perlindungan Saksi dan Korban Yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.

Direktur,

Prof. Dr. H. Sarson W.DJ. Pomalato, M.Pd
NIP. 196008081986021003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA**

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 1028/UN47.C/HK.04/2020**

TENTANG

**PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER HUKUM
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan membuat Tesis untuk meraih gelar Magister;
b. bahwa untuk membimbing penulisan disertasi tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan Akademik;
c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mengenai penunjukan Pembimbing.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor 106/E/O/2014, tanggal 19 Mei 2014, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo;
15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/H47.A2/DT/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Untuk Atas Nama Rektor Menandatangani Surat Keputusan yang Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo
2. Permohonan Pergantian Pembimbing Prodi Magister Hukum Tanggal 12 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO TENTANG PEMBIMBING

- KESATU : Menyetujui usulan Pembimbing Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pembimbing, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusikannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi tesis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo
Tanggal 14 Oktober 2020

DIREKTUR, 

ASNA ANETA

NIP 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
2. Ketua Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 NOMOR 1028/UN47.C/HK.04/2020
 TANGGAL 14 OKTOBER 2020
 TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA/NIM	JUDUL TESIS	PEMBIMBING
1.	Khairunnisa Muchsin 710519002	Kontitusionalitas Terhadap Parlemen Di Indonesia	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum 2. Dr. Ha. Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH
2.	Abdul Rahman A. Ali 710519020	Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Tinjau Dari Pasal 23KHI (Studi kasus terhadap penetapan pengadilan agama gorontalo)	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum 2. Dr. Lusiana Margaret tijow ,SH., MH
3.	Ahmad 710519015	Kewenangan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945 oleh mahkamah konstitusi dalam prespektif Contitusional dialog)	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
4.	Budi Hartono 710519004	Efektifitas pengawasan BAWASLU Gorontalo Utara terhadap netralitas aparat sipil Negara pada pemilihan kepala daerah tahun 2014	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH 2. Dr. Lusiana Margaret Tijow, SH., MH
5.	Gustab Mustofa Botutihe 710519010	Pelaksanaa PERJA no. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntut berdasarkan keadilan restorative dalam penuntutan tindak pidana di Kejaksaan negeri kota gorontalo	1. Dr. Ha. Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH 2. Dr. Lusiana Margaret Tijow, SH., MH
6.	Imam Fajar Awulia Abas 710519011	Peran Polda Gorontalo Dalam Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan perempuan dan anak	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
7.	Kadimmudin Baehaki 710519007	Efektifitas pengawasan BAWASLU terhadap kegiatan money politik pada pemilukada dikabupaten gorontalo utara	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum 2. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
8.	Karina Nataya Walenta 710519023	Perkawinan Suku Sedara Suku Polahi Dalam Perpektif Kearifan Lokal Ditinjau Dari UU Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	1. Dr. Ha. Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH 2. Dr. Lusiana Margaret Tijow, SH., MH
9.	Lufti Amir 710519016	Penyelesaian Panah Wayer Dalam Konteks Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Gorontalo	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH 2. Dr. Ha. Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH

10.	Muhammad Furqon 710519013	Analisis Pututsan MA Atas Kasus First Travel	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum 2. Dr. Lusiana Margaret Tijow, SH., MH
11.	Muhammad Yusuf Putra 710519018	Pernikahan Online Dalam Kacamata Adat Gorontalo Dan Hukum Perdata Dimasa Pandemi	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum 2. Dr. Ha. Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH
12.	Rinaldi Putra Anwar 710519021	Efektivitas Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dalam Kecelakaan Dijalan Raya	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
13.	Rocky Saputra M Ibrahim 710519005	Perlindungan Hak Anak Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH 2. Dr. Lusiana Margaret Tijow, SH., MH
14.	Ruly Lamusu 710519014	Penyuluhan Dan Penerangan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Hukum. (Study Kpencegahan Korupsi Dana Desa Di Gorontalo Utara)	1. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH 2. Dr. Lusiana Margaret Tijow, SH., MH
15.	Ryan Dodo Hutagalung 710519009	Peran Polri Terhadap Penanganan Premanisme Yang Ada Di Kota Gorontalo.	1. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH 2. Dr. Lusiana Margaret Tijow, SH., MH
16.	Sabaruddin 710519017	Model Pembinaan Anak Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Dilembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Gorontalo	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum 2. Dr. Udin Hamim, SH, M.Si
17.	Silvana Diani 70519019	Analisis Perlindungan Hukum Pelaku Narkotika Di Kota Gorontalo	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum 2. Dr. Ha. Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH
18.	Sofyan Wanandi Putra Bempah 710519006	Pembagian Harta Warisan Adat Suku Jawa Tondano (JATON) di Desa Reksonegoro Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum 2. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
19.	Sufrin Mohulaingo 710519008	Eksistensi Bpd Sebagai Fungsi Legislasi, Budgeting Dan Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum 2. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH

20.	Tri Alan M. Djaini 710519022	Tinjauan Sosio Yuridis Dan Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Pengadilan. (Studi Kasus di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo).	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH 2. Dr. Lusiana Margaret Tijow, SH., MH
21.	Yusuf Hamzah 710519003	Rekonstruksi Pasal 280 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sebagai Upaya Mencegah Kecurangan Pemilu.	1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH 2. Dr. Ha. Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH

/s/ DIREKTUR, W



ASNA ANETA

NIP 195912271986032003